

Jejak Sejarah Jubah KH Hasyim Asy'ari : Simbol Kekuasaan Kolonial Belanda

Imas Farika

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

iimasfarica@gmail.com

Abstrak: Artikel ini akan membahas mengenai jejak sejarah dari salah satu tokoh besar di Indonesia yaitu KH Hasyim Asy'ari. jejak sejarah yang dimaksud adalah jubah milik Mbah Hasyim yang diketahui merupakan peninggalan asli dari mbah Hasyim sendiri. Kini jubah tersebut menjadi salah satu koleksi di museum yang terletak di Jombang. Jubah tersebut memberikan satu jalan baru yang perlu diteliti mengenai Kekuasaan kolonial belanda. Pada era tersebut jubah putih menjadi salah satu alat yang digunakan oleh kolonial belanda untuk mengontrol penduduk pribumi. Maka penelitian ini akan menelusuri mengenai bagaimana kolonial menjadikan jubah putih menjadi alat kontrol kekuasaan mereka dan bagaimana keterkaitan jubah Mbah Hasyim terhadap hal tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer sendiri diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga karya ilmiah yang membahas topik terkait. sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, dan juga literatur lainnya. Penelitian ini akan berfokus pada jubah sebagai simbol kekuasaan kolonial belanda, dan keterkaitannya dengan jubah milik mbah Hasyim. Jubah tersebut tak hanya sebatas sebagai alat kontrol kekuasaan kolonial belanda saja, dalam perspektif lain dari tokoh seperti kh hasyim asy'ari dan juga para tokoh lainnya dilambangkan sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial.

Kata Kunci: *jubah, simbol, kekuasaan, hasyim asy'ari, kolonial, kontrol*

PENDAHULUAN

Pemerintahan kolonial belanda di Indonesia dimulai sekitar tahun 1800-an, pada masa itu penekanan terhadap pribumi terus dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia. Penekanan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja namun juga dalam bentuk aturan ketat yang cenderung merugikan para penduduk pribumi. Berbagai aturan diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda demi menguntungkan dan menjaga kestabilan kekuasaan mereka. salah satunya yaitu kebijakan mengenai Ibadah Haji. Kebijakan yang dikenal sebagai Ordonansi Haji tersebut diberlakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penduduk pribumi yang telah melaksanakan ibadah haji. Pakaian jubah putih menjadi simbol yang digunakan dalam ordonansi haji dalam kontrol kekuasaan mereka.

Jubah putih tidak serta merta muncul begitu saja sebagai simbol yang digunakan belanda untuk kontrol kekuasaan mereka, kekhawatiran pemerintah belanda terhadap orang-orang yang melakukan haji menjadi cikal bakal dari munculnya ordonansi haji, selain itu kolonial belanda juga melihat peluang keuntungan yang didapat dengan memonopoli ibadah haji yang seharusnya bernilai sakral bagi umat muslim. Dalam ibadah haji, jubah putih berperan sebagai identitas keagamaan yaitu sebagai penanda bagi orang-orang yang telah melaksanakan haji. Selain itu, jubah putih menjadi simbol solidaritas dan perlawanan terhadap kolonial. Jubah putih digunakan oleh tokoh pejuang seperti KH Hasyim Asy'ari yang mencerminkan komitmen mereka terhadap ajaran islam dan juga penolakan terhadap dominasi kolonial.

Namun, lain halnya dengan pemerintah belanda yang menganggap jubah putih sebagai bentuk kewaspadaan mereka akan munculnya pemberontakan dari kalangan berjubah putih. Karena pandangan mereka terhadap penduduk yang telah melaksanakan haji membawa ajaran dan pemikiran dari timur yang berpotensi memicu timbulnya pemberontakan.

Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu jubah putih yang memiliki makna dalam berbagai perspektif salah satunya yaitu pemerintah belanda. Jubah putih dijadikan sebagai salah satu alat kontrol kekuasaan mereka yang timbul dari prasangka sosial terhadap penduduk yang telah melaksanakan ibadah haji.(Hasanah, 2023) beberapa penelitian juga membahas mengenai jubah putih yang digunakan sebagai syarat atribut dalam kebijakan ordonansi haji namun lebih berfokus pada Ordonansi haji itu sendiri.

Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode heuristik dengan pengumpulan data dari sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer sendiri diperoleh melalui observasi dan juga dokumentasi, dan sumber sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan melalui referensi berupa buku, jurnal, dan penelitian yang terkait dengan topik pembahasan. Selanjutnya analisis sumber dilakukan atau disebut dengan kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber. Analisis fakta sejarah atau interpretasi dilakukan setelah memperoleh fakta sejarah, dan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.(Abdurahman, 2011)

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Ordonansi Haji salah satunya seperti "*Kolonialisasi Gelar Haji: Inisiasi Belanda Waspada Perlawanan Umat*" yang ditulis oleh Aldhania Uswatun Hasanah (Hasanah, 2023), yang membahas mengenai Ordonansi Haji yang muncul karena prasangka sosial pemerintah belanda dan dominasi politik haji yang dilakukan oleh belanda sangat kental pada masa penjajahan. penelitian ini lebih menekankan pada gelar haji dan penekanan belanda terhadap penduduk melalui ordonansi haji yang diberlakukan.

Penelitian lainnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Irfai Muslim dengan judul “*Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*” penelitian ini lebih berfokus pada perkembangan dari ibadah haji dari masa ke masa, dan di dalamnya juga menyangkut mengenai ordonansi haji karena periode yang dibahas dari masa kolonial hingga kemerdekaan.

Dan juga penelitian yang ditulis oleh Suparman dengan judul “*Gaya Busana Identitas Ulama Sunda 1800-1998*” yang didalamnya membahas mengenai busana yang dipakai ketika masa kolonial. (Suparman, 2020) Penelitian ini menguraikan berbagai busana yang dipakai oleh penduduk nusantara ketika masa kolonial dan jubah putih juga termasuk di dalamnya, namun penelitian ini lebih berfokus pada busana yang digunakan oleh para ulama sunda.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, penelitian tersebut banyak membahas mengenai ordonansi haji itu sendiri dan perkembangan ibadah haji pada masa kolonial, penelitian tersebut hanya membahas sekelebat saja mengenai jubah putih yang menjadi salah satu syarat yang dicantumkan dalam kebijakan ibadah haji yang diberlakukan oleh belanda. Maka penelitian ini akan lebih berfokus pada penggunaan jubah putih dari perspektif kolonial yang dianggap sebagai simbol kekuasaan mereka, sementara di sisi lain jubah putih didefinisikan sebagai identitas agama dan lambang perlawanan terhadap penjajah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Sejarah Jubah Putih KH Hasyim Asy’ari

Jubah putih milik KH Hasyim Asy’ari menjadi salah satu jalan baru dalam menelusuri jejak sejarah pada masa kolonial. KH Hasyim Asy’ari sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang terkenal akan pemikiran dan kontribusinya sehingga jubah milik beliau menjadi bukti penting dari bagian sejarah. Jubah tersebut kini dipamerkan di museum yang terletak di Jombang yaitu Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari. Jubah tersebut merupakan jubah asli milik KH Hasyim Asy’ari, berdasarkan pernyataan staf yang bekerja di museum Tebuireng, jubah tersebut diperoleh melalui proses penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh staf museum. Jubah putih yang dipakai oleh Mbah Hasyim menjadi salah satu identitas beliau sebagai seorang ulama yang juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan pada masa kolonial belanda.



Gambar 1: koleksi jubah Mbah Hasyim di museum Minha , 2024

Selain mbah hasyim terdapat tokoh-tokoh lain yang menggunakan jubah putih sebagai simbol perlawanan terhadap belanda salah satunya pangeran diponegoro dalam memimpin pemberontakan, pangeran Dipenogoro memakai jubah putih dan juga sorban sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial belanda.(Suparman, 2020)Namun sebelum jubah putih menjadi simbol perlawanan dan penolakan terhadap belanda. Hal ini juga yang mempengaruhi diperketatnya pengawasan dan pembatasan terhadap jamaah haji. Simbol jubah putih sebagai dalang yang akan menyebabkan pemberontakan melekat dalam pandangan belanda sehingga mereka memberlakukan jubah sebagai alat untuk pengawasan terhadap orang yang telah berhaji.

Jubah putih sendiri terinspirasi dari pakaian para pedagang Arab, Persia, dan India yang datang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, dan wilayah pesisir Jawa. Selain itu para pedagang, dan juga ulama yang datang dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan membawa gaya busana seperti jubah dan gamis yang biasa dipakai oleh orang muslim di timur tengah.(Ulfa & Mulia, 2016)

Selain itu jamaah haji yang kembali dari mekkah, sering membawa kembali tradisi dan pakaian putih yang melambangkan tanda kesucian. Tradisi pakaian jubah putih diadopsi oleh para penduduk terutama para tokoh agama. Dalam agama islam sendiri pakaian putih memiliki makna sebagai pakaian terbaik yang melambangkan kesucian, kebersihan, dan kesederhanaan dan juga disunahkan oleh Rasulullah. Pada masa kolonial belanda berkuasa, jubah putih memiliki makna lain sebagai pembeda busana antara penduduk nusantara dan kolonial belanda yang busananya bergaya eropa. Tak hanya itu, jubah putih digunakan sebagai pakaian perang dan melambangkan perlawanan terhadap kolonial belanda.

Simbol Jubah Putih sebagai alat kontrol kekuasaan belanda

Jubah putih memiliki berbagai makna dari pandangan agama, dan juga sebagai simbol perlawanan dari para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lain halnya dengan pemerintah Belanda yang memandang jubah putih penuh dengan prasangka dan juga kekhawatiran. Prasangka yang timbul tersebut berasal dari pendapat mereka yang menganggap orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji berpotensi membawa pemikiran yang dapat memberikan pengaruh bagi penduduk untuk melakukan pemberontakan yang dapat mengancam kekuasaan kolonial Belanda. Disamping itu, para penduduk yang telah melaksanakan haji membawa tradisi pakaian putih seperti jubah yang dalam agama Islam memiliki makna kesucian.

Kecurigaan terhadap jamaah haji tersebut bukan tanpa alasan pemberontakan yang dihadapi oleh kolonial Belanda, salah satunya seperti Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825-1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dengan atribut perangnya yaitu jubah putih dan juga surban. (Dewi, 2020) Perang tersebut termasuk dalam perang yang paling memberikan banyak pengaruh bagi Belanda karena menyebabkan kerugian besar dari segi ekonomi maupun militer. Perang Aceh yang dimana banyak ulama yang mengambil peran penting dalam perang tersebut menggunakan atribut jubah putih dan surban sebagai lambang kesucian dan semangat anti kolonialisme. (Ika Purnamasari et al., 2024)

Kekhawatiran Belanda terhadap para penduduk yang melaksanakan haji semakin besar, hingga Belanda melakukan berbagai upaya mulai dari pengawasan dan pemberlakuan aturan yang diharapkan bisa membatasi dan mengurangi jumlah jamaah haji. Namun semangat penduduk untuk melaksanakan ibadah haji tak surut dan jumlah jamaah haji terus meningkat. Pengawasan terhadap penduduk haji pun dilakukan dengan menggunakan atribut khusus haji yaitu jubah putih sebagai alat pengawasan. Apabila terjadi pemberontakan maka yang akan dicurigai sebagai dalang atau ketua pemberontakan tersebut adalah orang-orang yang memakai atribut khusus haji. Atribut khusus haji yang dipakai oleh penduduk yang kembali dari Mekkah tidak serta merta boleh dipakai begitu saja, penduduk yang telah melaksanakan haji harus mengikuti ujian haji, dan apabila mereka lulus ujian haji tersebut maka mereka diharuskan untuk memakai atribut khusus haji.

Kekhawatiran dan prasangka Belanda terhadap penduduk yang melaksanakan haji, juga muncul karena ketidapahaman mereka mengenai ibadah haji tersebut. Belanda memberikan prasangka mereka dan membuat pertauran yang semena-mena dari prasangka yang mereka miliki. Hingga peraturan yang sangat ketat diberlakukan dan merugikan penduduk Nusantara yang ingin melaksanakan haji. Namun ketika Snouck Hurgronje datang sebagai penasihat pemerintah Belanda, prasangka mengenai ibadah haji berpotensi mengancam kekuasaan kolonial Belanda diperbaiki namun aturan-aturan haji yang diberlakukan masih sangat memonopoli dan merugikan penduduk Nusantara.

Latar belakang munculnya Ordonansi Haji

Ketika Belanda berkuasa pada abad ke-19, kekhawatiran muncul terhadap jemaah haji yang semakin meningkat. Hal tersebut bukan tanpa alasan, kolonial belanda menganggap jemaah haji yang telah kembali dari mekkah dapat membawa pemikiran yang dapat menimbulkan pemberontakan terhadap belanda. Kecurigaan mereka terhadap ibadah haji, karena khawatir ibadah haji bukan hanya sebagai bentuk kegiatan bersifat ritual namun juga membawa semangat perlawanan terhadap belanda.

Pengawasan terhadap ibadah haji pun dilakukan karena anggapan sosial mereka, salah satunya pemberlakuan aturan terkait ibadah haji. Gubernur Jenderal Daendels membuat aturan calon jemaah haji harus menggunakan pas jalan ketika hendak pergi berhaji. Peraturan tersebut diberlakukan dengan dalih alasan keamanan dan ketertiban. Selain itu pemerintah belanda juga membiarkan pengelolaan haji dalam keadaan serba kekurangan hal tersebut dilakukan dengan harapan jumlah jemaah haji dapat berkurang. Pemerintah belanda juga menjadikan pengelolaan haji menjadi sumber pendapatan mereka.(Muslim, 2020)

Pada tahun 1811-1814 dibawah pimpinan Jenderal Raffles, dikeluarkan edaran untuk mewaspadai orang-orang yang berhaji karena dapat mengancam kolonial. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1825 Beslit No. 9 ditetapkan oleh pemerintah belanda yang berisi para calon jemaah yang melaksanakan ibadah haji harus membayar pas jalan atau paspor haji sebesar 110 gulden, dan bagi yang tidak membeli pas jalan akan dikenakan denda sebesar 1000 gulden, namun resolusi yang dikeluarkan oleh pemerintah belanda memiliki tujuan terselubung yaitu untuk membatasi kuota jemaah haji. beslit yang dikelurkan oleh pemerintah belanda mengalami beberapa perubahan ketika masa kepemimpinan Duymaer Van Twist.(Rohmatulloh, 2017)

Peraturan resmi mengenai pelaksanaan ibadah haji kembali dikeluarkan pada masa jenderal Ch. F Pahud yang disebut dengan Pelgrims Ordonantie. Peraturan ini merupakan reguasi haji pertama yang dimuat dalam Staatbland Van Neverlandsch-Indie tanggal 6 Juli 1859 No.42.21. salah satu ciri-ciri dari ordonansi haji tersebut yaitu para jemaah yang telah kembali dari mekkah harus melewati ujian haji yang akan meunjukkan bahwa ia benar-benar telah mengunjungi mekkah, dan jika mereka telah lulus dari ujian haji tersebut maka mereka diperbolehkan menyandang gelar haji dan diwajibkan memakai busana haji seperti jubah putih dan sorban.(Hasanah, 2023)

Pada tahun 1889, Snouck Hurgonje yang berperan sebagai penasihat pemerintah kolonial menyarankan agar beberapa kebijakan kepada pemerintah belanda. Karena menurutnya peraturan yang diberlakukan tidak jelas efek apa yang di inginkan oleh pemerintah dengan mempersulit ibadah haji.(Wulandari et al., 2024) Snouck berpendapat bahwa pergi menunaikan ibadah haji bukanlah berarti fanatik dan berjiwa

pemberontak, dan kebijakan mengenai haji harus didasarkan pada analisis statistik bukan hanya pertimbangan politik. Ia menegaskan bahwa orang Islam di Nusantara hanya ingin melakukan ibadah haji saja. Kendati demikian Snouck juga berpendapat bahwa yang membahayakan kekuasaan kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama tetapi Islam sebagai doktrin politik. (Harahap, 2023)

KESIMPULAN

Prasangka kolonial Belanda terhadap para jamaah haji yang telah kembali dari Mekkah dapat memberikan pengaruh kepada penduduk Nusantara untuk melakukan pemberontakan. Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang telah melakukan ibadah haji kembali dengan membawa pemikiran tentang semangat juang untuk melakukan perlawanan. Prasangka tersebut juga timbul karena ketidakpahaman mereka mengenai esensi dari ibadah haji itu sendiri. Ditambah pemberontakan yang dihadapi oleh Belanda dimana para tokoh yang berperan penting dalam pemberontakan tersebut memakai atribut jubah putih dan sorban yang identik dipakai oleh orang yang telah berhaji.

Kekhawatiran mereka semakin bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ingin melaksanakan ibadah haji. Mereka berfikir semakin banyak penduduk yang melaksanakan haji maka semakin banyak dalang yang muncul yang berpotensi akan melakukan pemberontakan berbagai upaya dilakukan pemerintah Belanda untuk membatasi penduduk yang ingin melaksanakan haji. Aturan-aturan yang dibuat memberikan penekanan terhadap penduduk. Pengawasan pun dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan menggunakan atribut haji sebagai alat pengawasan mereka. Kolonial Belanda mengawasi dan mewaspadaikan penduduk yang memakai jubah putih apabila terjadi pemberontakan, maka para penduduk yang memakai jubah putih akan didakwa sebagai dalang dari pemberontakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2011). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. In *Penerbit Ombak*.
- Dewi, V. M. (2020). Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825-1830. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 2(2), 147–158. <https://doi.org/10.31540/sindang.v2i2.254>
- Harahap, N. I. (2023). HAJI DI MASA KOLONIAL : Ordonansi dan Resolusi. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 4(1), 67–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/islamijah.v4i1.17078>
- Hasanah, A. U. (2023). Kolonialisasi Gelar Haji: Inisiasi Belanda Waspada Perlawanan Umat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2712. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2402>
- Ika Purnamasari, Tappil Rambe, Juni Elfi Br Purba, Dwi Adinda, & Muhammad Waldano. (2024). Perang Aceh Perlawanan terhadap Kolonialisasi Belanda Aceh War Resistance Against the Colonialization of the Netherlands. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 152–161. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1507>

- Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan. *Jurnal Manajmen Dakwah*, 6(1), 51–66.
- Rohmatulloh, D. M. (2017). Perjalanan Haji Indonesia di Masa Kolonial. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 9(02), 115–127. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>
- Suparman. (2020). Gaya Busana Identitas Ulama Sunda 1800-1998. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 17(1), 26–42. <https://doi.org/10.15575/al-Tsaqafa.v17i1.8917>
- Ulfa, R., & Mulia, U. B. (2016). Analisis Semiotika Pierce Pakaian Jenis Gamis Sebagai Representasi Budaya Arab. *Universitas Bunda Mulia*, 10(2), 407 dan 430.
- Wulandari, N. D., Agung, R. M., & Andriyanto. (2024). Dinamika Haji Indonesia: Masa Prakolonial Sampai Masa Kolonial. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.32585/keraton.v6i1.5510>